

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan ekonomi daerah disusun dalam rangka memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan dalam lingkup daerah, regional dan global yang dihadapi. Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk suatu bangunan ekonomi daerah yang selaras dan seimbang.

Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro, baik yang dipengaruhi faktor internal, serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian global. Sedangkan kerangka pendanaan merupakan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan, perkiraan kemampuan belanja dan pembiayaan.

Untuk itu diharapkan rancangan kerangka ekonomi ini mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk mencapai target kinerja pembangunan.

Tema yang diusung dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2016 adalah **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”**, sebagaimana yang tertuang dalam prioritas pembangunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2015-2019. Pembangunan berkualitas adalah membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Sedangkan infrastruktur diperlukan mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan mengusung tema **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA Akhir 2015”**. Beberapa isu strategis pembangunan Jawa Timur yang perlu menjadi perhatian masing-masing

daerah dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), antara lain :

1. Peningkatan produktivitas sertor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
4. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha (investasi);
5. Peningkatan porsi belanja modal pemerintah daerah untuk menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan.

Kebijakan ekonomi Jawa Timur tahun 2016 bertumpu pada kedaulatan pangan dimana menitikberatkan pada pembangunan di sektor unggulan. Adapun arah kebijakan untuk mencapai kedaulatan pangan tersebut antara lain peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat serta mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan. Sehingga diharapkan target pertumbuhan ekonomi akan mampu diwujudkan dan memberikan dampak terhadap kinerja penurunan pengangguran terbuka, penurunan kemiskinan, peningkatan IPM serta penurunan disparitas wilayah.

Pertumbuhan perekonomian nasional tahun 2014 mencapai kisaran 5,1% dimana hal ini diselaraskan dengan kemiskinan bulan September 2014 sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami penurunan 0,68%.

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi global yang masih belum menunjukkan pemulihan yang cukup berarti memberikan risiko dampak terhadap kinerja perekonomian nasional. Meskipun kinerja ekonomi Amerika Serikat mengalami perbaikan yang melebihi ekspektasi pasar, namun masih terdapat risiko kebijakan uang ketat yang akan dilakukan pada periode yang akan datang. Selain itu, krisis ekonomi

yang terjadi di Rusia diperkirakan juga akan menurunkan kinerja ekonomi global. Di sisi lain, penerapan kebijakan likuiditas yang longgar oleh Eropa dan Jepang diperkirakan memberikan sumbangan positif terhadap pasar keuangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang pada akhirnya akan memengaruhi aktivitas investasi.

Di awal tahun 2015, aktivitas investasi diharapkan kembali meningkat seiring dengan program-program pemerintahan yang baru yang menekankan pada perbaikan sisi *supply* dari perekonomian melalui infrastruktur sehingga hal tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi. Berbagai upaya yang akan dilakukan Pemerintah, antara lain realokasi belanja dengan meningkatkan porsi belanja infrastruktur, dan pemangkasan jalur izin usaha serta investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan investasi, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan dan strategi pembangunan yang terpadu antara pusat dan daerah, peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, serta pemberian insentif dan fasilitas baik fiskal maupun non fiskal

Sementara itu, kebijakan sektor industri akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing industri dan ekonomi melalui akselerasi pengembangan industri, baik dari sisi perencanaan program maupun penetapan target. Program percepatan pertumbuhan industri dilaksanakan melalui; (1) hilirisasi industri berbasis agro, tambang mineral, dan migas; (2) peningkatan daya saing industri berbasis pada sumber daya manusia, pasar domestik, dan ekspor; dan (3) pengembangan industri kecil dan menengah serta industri kreatif. Selain itu, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) akan dilaksanakan pada semua sektor, baik barang maupun jasa.

Secara Nasional, perekonomian Indonesia tahun 2014 tumbuh sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,02 persen,

diikuti Jasa Perusahaan sebesar 9,81 persen dan Jasa Lainnya sebesar 8,92 persen. Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu : Industri Pengolahan (21,02 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,38 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor (13,38 persen). Sedangkan bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,01 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dan Konstruksi masing-masing sebesar 0,66 persen.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 terjadi di seluruh Provinsi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Propinsi Sulawesi Barat sebesar 8,73 persen, diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 7,93 persen dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,57 persen. Sedangkan Provinsi yang memiliki pertumbuhan di bawah pertumbuhan ekonomi nasional adalah Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Riau, Kalimantan Timur, dan Aceh. Kemudian struktur perekonomian tahun 2014 secara spasial didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 57,39 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 23,16 persen dan Pulau Sumatera sebesar 23,16 persen dan pulau-pulau lainnya kurang dari 10 persen.

Sementara itu pada level regional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2014 tumbuh sebesar 5,86 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,88 persen, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 8,52 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,17 persen. Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh lapangan usaha utama yaitu : Industri Pengolahan (28,90 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,73 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,24 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2014, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,22 persen, diikuti Perdagangan

Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,85 persen; dan Konstruksi sebesar 0,50 persen.

Pada level daerah, perekonomian Kota Kediri tahun 2014 tumbuh sebesar 6,45 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dalam lima tahun terakhir bisa dilihat sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2009 dengan PT. Gudang Garam Tbk. mencapai 5,06 persen, sedangkan tanpa PT. Gudang Garam Tbk. hanya 3,07 persen, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2010 menjadi 5,91 persen dengan PT. Gudang Garam Tbk. dan 3,66 persen tanpa PT. Gudang Garam Tbk. Pertumbuhan ekonomi naik cukup signifikan terjadi pada tahun 2011 dimana pertumbuhan ekonomi telah mencapai angka 7,93 persen dengan PT. Gudang Garam Tbk. dan 5,10 persen tanpa PT. Gudang Garam Tbk. Pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2011 masih relatif bisa dipertahankan pada tahun 2012 yakni mencapai 7,51 persen dengan PT. Gudang Garam Tbk. dan 4,79 persen tanpa PT. Gudang Garam Tbk. Sedangkan pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dengan PT. Gudang Garam Tbk. sebesar 6,45 persen dan tanpa PT. Gudang Garam Tbk. sebesar 4,07 persen.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Kediri yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi global, regional dan nasional pada tahun 2013 memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Kondisi ke arah yang lebih baik ini, membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian Kota Kediri di semua sektor ekonomi mulai sektor pertanian sampai dengan sektor jasa-jasa. Selain itu, perkembangan ekonomi sektoral juga diikuti dengan perubahan positif dari perkembangan PDRB yang berkualitas. Yaitu perkembangan PDRB yang memperhatikan perkembangan beberapa komponen antara lain perbaikan kualitas sumber daya manusia, pemerataan distribusi pendapatan, dan terjaga/terpeliharanya sumberdaya alam secara berkesinambungan.

Struktur ekonomi Kota Kediri masih tetap didominasi sektor Industri Pengolahan, yang diprediksi akan terus berlangsung dalam beberapa tahun mendatang. Keberadaan PT. Gudang Garam Tbk. sebagai pabrik rokok sigaret kretek mesin (skm) dan sigaret kretek tangan (skt) terbesar di Indonesia menyebabkan peran lapangan usaha/sector Industri Pengolahan di Kota Kediri masih menjadi

yang terbesar dengan nilai 73 persen pada tahun 2009 dan masih tetap dominan sebesar 70 persen pada tahun 2013. Kontributor terbesar urutan kedua adalah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran yaitu 19 persen pada tahun 2009 dan meningkat pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 22 persen. Urutan berikutnya adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Persewaan dengan bertahan pada nilai 5 persen sepanjang lima tahun terakhir. Ada satu sektor yang relatif konsisten mengalami peningkatan peran dalam pembentukan PDRB tahun 2009-2013 yaitu Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran yakni sebesar 19 persen pada tahun 2009 dan 2010, menjadi 22 persen pada tahun 2012 dan 2013.

Basaran nilai PDRB dengan PT. Gudang Garam Tbk. Atas dasar Harga Berlaku (ADHB), untuk periode tahun 2008-2013 rata-rata mengalami kenaikan sekitar 14%. Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kurun waktu tahun 2008-2013 berturut-turut sebesar : Rp.44,259 triliun (2008), Rp.50,414 triliun (2009), Rp.57,247 triliun (2010), Rp.65,321 triliun (2011), Rp.74,808 triliun (2012) dan Rp.84.796 triliun pada tahun 2013.

Sedangkan nilai PDRB dengan PT. Gudang Garam Tbk. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama tahun 2008-2013 berturut-turut yaitu: Rp.19.742 triliun (2008), Rp.20.741 triliun (2009), Rp.21,967 (2010), tahun 2011 sebesar Rp.23,710 triliun, tahun 2012 sebesar Rp.25,490 triliun dan Rp.27.133 triliun pada tahun 2013.

Selanjutnya capaian indikator makro ekonomi Kota Kediri pada tahun 2011-2013 serta proyeksi capaian tahun 2014-2016 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Kediri
Tahun 2011-2014

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI			PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		TAHUN 2011	TAHUN 2012*	TAHUN 2013**	TAHUN 2014***	TAHUN 2015***	TAHUN 2016***
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan PT.Gudang Garam :						
	ADHB (Trilyun Rp)	65.321	74.808	84.796			
	ADHK (Trilyun Rp)	23.710	25.490	27.133	28.600 s.d. 29.200	30.106 s.d 31.280	31.590 s.d 33.839
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa PT.Gudang Garam :						
	ADHB (Trilyun Rp)	19.464	21.487	23.519			
	ADHK (Trilyun Rp)	7.247	7.594	7.903	8.200 s.d. 8.350	8.518 s.d 8.755	8.734 s.d. 9.315

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI			PROYEKSI TAHUN 2014***	PROYEKSI TAHUN 2015***	PROYEKSI TAHUN 2016***
		TAHUN 2011	TAHUN 2012*	TAHUN 2013**			
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB dengan PT.Gudang Garam ADHK tahun dasar 2000)	7,93%	7,51%	6,45%	5,47% s.d. 7,10%	5,20% s.d. 7,64%	4,93% s.d 8,18%
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB tanpa PT.Gudang Garam ADHK tahun dasar 2000)	5,10%	4,79%	4,07%	3,91% s.d. 4,87%	3,72% s.d. 5,63%	2,53% s.d 6,40%
5.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHK):						
	Pertanian	0,19%	0,18%	0,18%			
	Pertamb. & Penggalian	0,0004%	0,0002%	0,0002%			
	Industri pengolahan	71,10%	70,36%	70,15%			
	Listrik, gas & air bersih	0,25%	0,25%	0,25%			
	Bangunan	0,20%	0,21%	0,21%			
	Perdagangan, Hotel & Restoran	21,25%	21,96%	22,10%			
	Pengangkutan & Komunikasi	1,01%	1,04%	1,07%			
	Keu. Persewaan & jasa pers	4,52%	4,52%	4,55%			
	Jasa-jasa	1,46%	1,47%	1,48%			
	Tingkat Inflasi – IHK	3,62%	4,63%	8,05%			
6.	Jumlah Penduduk Miskin / Prosentase	23,33 (8,6%)	22,30 (8,11%)	22,30 (8,20%)			
7.	Jumlah Rumah Tangga miskin / Prosentase	10.323 (9,83%)	10.335 (8,00%)	6,8 %			
8.	Tingkat Pengangguran (terbuka)	4,93%	7,85%	7,99 %			
9.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						
	Pendapatan Perkapita (ADHB) (Juta Rp)	241.917	270.437	304.944			
	Pendapatan Perkapita (ADHK) (Juta Rp)	87.809	92.149	97.578			
10.	Besaran IPM	76,79	77,20	77,80			
11.	Perbandingan- perbandingan : Pajak Daerah terhadap PDRB : Pajak (Juta Rp) PDRB (Juta Rp) (%)	<u>34.027.160</u> 65.321.986,64 (0,05%)	<u>25.044.844</u> 73.159.000,00 (0,03)	<u>17.468.000</u> 81.939.000,00 (0,02%)			
	Biaya Pendidikan terhadap PDRB :						
	Biaya Pendidikan (Juta Rp) PDRB (Juta Rp) (%)	<u>265.741.604</u> 65.321.986,64 (0,40%)	<u>283.930.760</u> 73.159.000,00 (0,40%)	<u>36.272.602.400</u> 81.939.000,00 (0,044%)			
	Biaya Kesehatan terhadap PDRB : Biaya Kesehatan (Juta Rp) PDRB (Juta Rp) (%)	<u>169.233.596</u> 65.321.986,64 (0,25%)	<u>176.084.768</u> 73.159.000,00 (0,24)	<u>106.227,363</u> 81.939.000,00 (0,12%)			
	PAD terhadap PDRB PAD (Juta Rp) PDRB (Juta Rp) (%)	<u>117.491.372</u> 65.321.986,64 (0,17%)	<u>101.473.836</u> 73.159.000,00 (0,15%)	<u>88.275,238</u> 81.939.000,00 (0,10%)			

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI			PROYEKSI TAHUN 2014***	PROYEKSI TAHUN 2015***	PROYEKSI TAHUN 2016***
		TAHUN 2011	TAHUN 2012*	TAHUN 2013**			
	Dana Perimbangan terhadap PDRB :	<u>502.783.223</u>	<u>581.369.730</u>	<u>482.799.495</u>			
	Dana Perimbangan (Juta Rp)	65.321.986,64	73.159.000,00	81.939,000,00			
	PDRB (Juta Rp)	(0,76%)	(0,79%)	(0,58%)			
	(%)						

Sumber : BPS, KER Prop. Jatim, Bappeda (diolah)

Ket : *) angka perbaikan

Ket : **) angka sementara

Ket : ***) angka amat sangat sementara (metode analisis shift share)

Dalam tabel di atas menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita Kota Kediri yang dilihat dari besaran PDRB per kapita merupakan besaran PDRB yang telah dibagi dengan jumlah penduduk Kota Kediri. Sehingga besaran PDRB per kapita ini sangat dipengaruhi oleh pertambahan atau laju perkembangan penduduk Kota Kediri. Jika dihitung atas dasar harga konstan, PDRB perkapita Kota Kediri dengan PT. Gudang Garam Tbk. pada tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar Rp.241.917 Juta (2011), tahun 2012 sebesar Rp.270.437 juta, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.304.944 juta. Adapun PDRB perkapita Kota Kediri tanpa PT. Gudang Garam Tbk. pada tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar Rp.87.809 juta (2011), tahun 2012 sebesar Rp.92.149 Juta, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.97.578 Juta.

Pada periode tahun 2011-2013, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri senantiasa mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 7,93 persen, pada tahun 2012 sebesar 7,51 persen dan tahun 2013 sebesar 6,45 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 pada kisaran 5,47 persen sampai dengan 7,10 persen dan untuk tahun 2015 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada kisaran 5,20 persen sampai dengan 7,64 persen. Sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 pada kisaran 4,93 persen sampai dengan 8,18 persen.

Penyajian angka proyeksi PDRB 2014-2016 sebagaimana tabel di atas dikarenakan angka PDRB 2014 masih dalam proses penghitungan dan penghitungan angka tersebut telah menggunakan tahun dasar tahun 2010.

b. Inflasi

Angka inflasi merupakan angka gabungan (*agregat*) dari perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan dianggap mewakili seluruh barang dan jasa yang dijual di pasar. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu angka inflasi, antara lain :

- 1). Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa, seperti tingkat produksi, distribusi dan stock. Produksi yang berlebih dan distribusi barang yang lancar seperti terjadi pada musim panen raya akan menyebabkan kelebihan penawaran barang dipasar (*excess supply*) dan harga serta inflasi akan turun, demikian pula sebaliknya;
- 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, perilaku, selera dan jumlah konsumen. Perilaku permintaan konsumen akan barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor musim, hari raya keagamaan/lebaran dan tahun baru;
- 3). Kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan harga barang dan jasa.

Mengingat begitu luasnya faktor-faktor sumber pemicu inflasi baik yang bersifat internal kondisi pasar itu sendiri maupun eksternal yaitu kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian makro yang saling terkait, maka sulit diidentifikasi besarnya faktor tunggal penyebab inflasi. Dengan demikian akan sulit juga memprediksi secara pasti besarnya tingkat inflasi yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang.

Perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2014 terkait erat dengan harga komoditas dan beberapa kebijakan harga. Dari sisi harga komoditas, terlihat adanya tekanan akibat gangguan cuaca dan hambatan pada arus distribusi. Pergerakan harga komoditas beras menunjukkan peningkatan akibat gangguan produksi yang disebabkan oleh meningkatnya intensitas kekeringan sebagai dampak el nino di beberapa sentra produksi beras tradisional. Perkembangan inflasi sepanjang tahun 2014 lebih dipengaruhi oleh pergerakan harga beberapa komoditas bahan pangan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan segar, dan minyak goreng.

Sementara itu, beberapa kebijakan di bidang harga (*administered prices*) seperti kebijakan tarif tenaga listrik (TTL), harga LPG tabung 12 kg, dan penyesuaian harga BBM bersubsidi di akhir tahun turut berkontribusi terhadap laju inflasi di tahun tersebut. Inflasi sepanjang tahun 2014 mencapai 8,36 persen.

Bila dilihat dari komponen pembentuk inflasi hingga Desember 2014, komponen inflasi harga diatur Pemerintah (*administered prices*) tercatat sebesar 17,57 persen (yoy). Tingginya tekanan inflasi yang bersumber dari komponen harga diatur pemerintah ini merupakan dampak penetapan rangkaian kebijakan reformasi di bidang energi yang dilaksanakan mulai tahun 2013. Meskipun sempat menurun pada bulan agustus 2014, laju inflasi komponen ini kembali meningkat didorong oleh kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014, masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter untuk premium dan solar. Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut merupakan langkah Pemerintah dalam rangka perbaikan skema subsidi yang lebih adil, dan untuk mendorong efisiensi dan realokasi struktur subsidi dan belanja negara yang lebih sehat, serta penghematan konsumsi energi nasional.

Setelah menjadi salah satu sumber tekanan inflasi di tahun 2013, laju inflasi komponen bergejolak (*volatile foods*) mulai mengalami moderasi dengan tren menurun selama bulan Januari-Agustus 2014, seiring dengan pergerakan harga beberapa komoditas bahan pangan yang relatif stabil. Namun kemudian, pada empat bulan terakhir tahun 2014, laju inflasi komponen bergejolak mengalami peningkatan yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga cabai yang tinggi. Sementara itu, komponen inflasi inti (*core inflation*) sedikit mengalami peningkatan yang antara lain dipengaruhi oleh gejolak nilai tukar rupiah serta dampak lanjutan dari tekanan inflasi yang bersumber dari pelaksanaan kebijakan di bidang energi.

Di tahun 2015, laju inflasi diperkirakan masih akan dibayangi tekanan sebagai dampak lanjutan dari beberapa kebijakan harga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2014. Selain itu, Pemerintah juga menyadari bahwa masih terdapat risiko tekanan inflasi yang berasal dari gejolak nilai tukar rupiah. Namun demikian, beberapa kebijakan pemerintah seperti upaya

peningkatan ketahanan dan pasokan pangan, perbaikan infrastruktur dan jalur distribusi barang, serta koordinasi dan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin baik diyakini mampu meredam tekanan inflasi yang terjadi. Di samping itu, relatif rendahnya tekanan harga komoditas dunia akan memberikan ruang yang lebih baik bagi pengelolaan tingkat harga di dalam negeri.

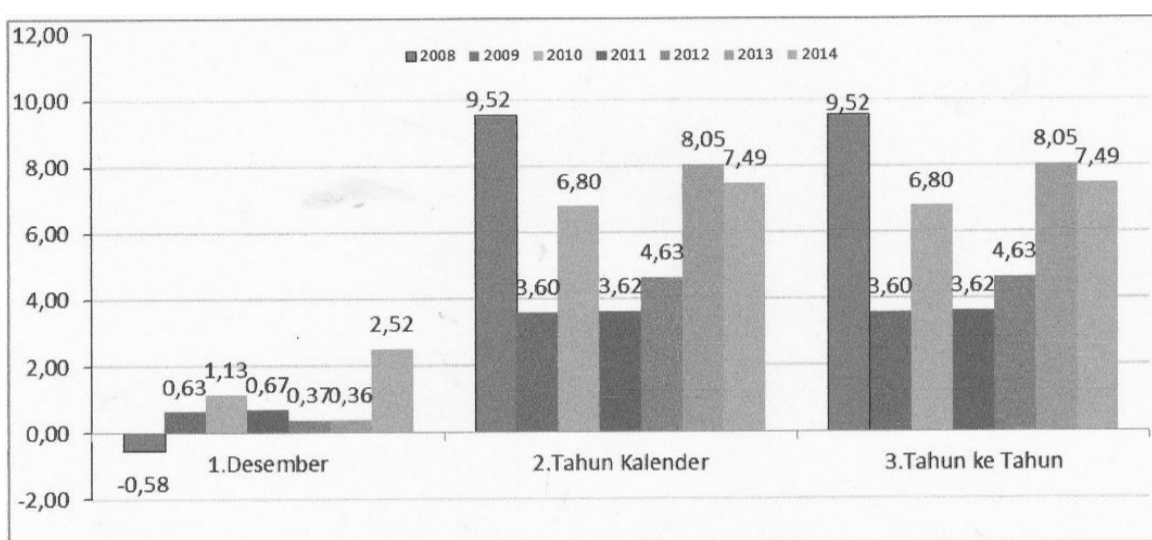
Melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, diharapkan laju inflasi pada tahun 2015 dapat dijaga pada kisaran 5,0 persen, berada pada batas atas dalam rentang sasaran inflasi tahun 2015 yang ditetapkan $4,0 \pm 1,0$ persen. Namun, upaya pengendalian laju inflasi nasional tahun 2016 masih menghadapi tantangan lain seiring dengan rencana pelaksanaan beberapa kebijakan di bidang energi sebagai bagian integral dari *road map* kebijakan energi nasional. Kebijakan tersebut diantaranya mencakup kebijakan *fixed subsidy* harga jual BBM bersubsidi, kebijakan penyesuaian harga jual LPG 12 kg, kebijakan kenaikan tarif kereta ekonomi jarak menengah dan jauh, serta kenaikan biaya pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) berpotensi menjadi faktor yang dapat mendorong peningkatan laju inflasi nasional di tahun 2015.

Pada level provinsi, inflasi pada Triwulan Pertama Tahun 2015 di Jawa Timur masih relatif terkendali, namun perlu diwaspadai potensi resiko inflasi yang dapat mempengaruhi pencapaian inflasi tahun 2015 khususnya dari kelompok *administered price*. Resiko tersebut utamanya terkait dengan ditetapkannya subsidi tetap BBM bersubsidi sehingga harga BBM ke depan lebih fluktuatif mengikuti pergerakan harga minyak internasional yang diproyeksikan meningkat di akhir tahun 2015. Penyesuaian tarif LPG 3 kg, tarif transportasi (kereta api, angkutan udara, tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah-PPNBM) serta tarif listrik berpotensi meningkatkan inflasi Jawa Timur di atas kondisi normalnya. Meskipun demikian, berbagai tekanan resiko tersebut diperkirakan mampu dikendalikan dengan baik sehingga inflasi Jawa Timur tahun 2015 diperkirakan tetap sesuai dengan sasaran inflasi Nasional yaitu $4\% \pm 1\%$. Pengendalian inflasi lebih banyak dilakukan melalui strategi produksi, distribusi, konektivitas

dan pengendalian ekspektasi melalui penguatan *early warning system* potensi resiko inflasi.

Pada level daerah, Stabilitas ekonomi Kota Kediri terlihat cukup mantap bila dilihat dari perspektif indikator inflasi. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata laju inflasi di Kota Kediri yang tidak melebihi dua digit. Dimana inflasi Kota Kediri pada tahun 2014 sebesar 7,49 persen, lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 8,36 persen, maupun inflasi Jawa Timur yang sebesar 7,77 persen. Berikut ini perbandingan laju inflasi tahunan di Kota Kediri periode 2009-2014.

Grafik 3.1
Laju Inflasi Tahunan Kota Kediri
Periode 2009-2014



Sumber : BPS Kota Kediri

Inflasi kumulatif Kota Kediri pada tahun 2014 sebesar 7,49 persen. Sedangkan apabila dilihat selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, laju inflasi kumulatif tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 9,52 persen, diikuti tahun 2013 sebesar 8,05 persen, dan tahun 2010 sebesar 6,80 persen. Inflasi kumulatif Kota Kediri terendah sepanjang kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,60 persen, tahun 2011 sebesar 3,62 persen dan tahun 2012 sebesar 4,63 persen.

Data-data PDRB, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan perekonomian Kota Kediri sampai pada tahun 2014 dalam kondisi yang cukup kondusif yang ditandai dengan karakter pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kondisi

tersebut menggambarkan bahwa kota Kediri adalah wilayah yang berpotensi sebagai aktivitas investasi para investor baik dari dalam maupun luar wilayah untuk menanamkan modalnya dalam berbagai sektor ekonomi.

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016

Kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perekonomian adalah belum adanya efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi, serta masih sangat tergantung pada perkembangan aktivitas PT. Gudang Garam Tbk. Pada kisaran 70% perekonomian Kota Kediri tergantung pada aktivitas PT. Gudang Garam Tbk.

Struktur perekonomian Kota Kediri akan sulit berkembang ketika dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil-hasil produksi maupun pada peningkatan investasi dalam era perdagangan bebas dan perekonomian dunia yang semakin terbuka. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, disamping meruntuhkan fondasi perekonomian nasional juga berpengaruh besar pada kondisi perekonomian di daerah, tidak terkecuali di Kota Kediri, tercatat bahwa pada tahun 1996 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri sebesar 13,96%. Akhir tahun 2007 turun menjadi sebesar 11,81% bahkan sebagai dampak krisis tersebut pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri turun drastis hingga menjadi minus 2,49%. Disamping itu struktur perekonomian Kota Kediri juga sangat tergantung pada pertumbuhan sektor industri, perdagangan dan jasa. Berdasarkan klasifikasi sektor, struktur ekonomi yang membentuk PDRB Kota Kediri terdiri dari 3 (tiga) sektor besar, yaitu :

- a. Sektor primer, terdiri dari sektor Pertanian dan sektor Pertambangan - Penggalian;
- b. Sektor sekunder, terdiri dari Industri Pengolahan, sektor Listrik - Gas - Air Bersih dan sektor Bangunan;
- c. Sektor tersier terdiri dari sektor Perdagangan, Hotel, Restoran, sektor Angkutan, Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-jasa

Trend historis peran masing-masing sektor yang membentuk struktur perekonomian di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Struktur Perekonomian Kota Kediri Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstans Tahun 2008-2012 (%)

Sektor	2008		2009		2010		2011*		2012**	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Primer	0,21	0,23	0,19	0,21	0,18	0,21	0,18	0,19	0,17	0,18
Pertanian	0,2	0,22	0,19	0,21	0,18	0,21	0,18	0,19	0,17	0,18
Petambangan & Penggalian	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekunder	76,07	74,46	75,72	73,62	75,31	73,59	73,03	71,57	72,03	70,82
Industri	75,53	74	75,21	73,16	74,81	73,13	72,53	71,11	71,54	70,36
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,35	0,26	0,32	0,26	0,31	0,26	0,3	0,26	0,29	0,25
Bangunan	0,19	0,2	0,19	0,2	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,21
Tersier	23,73	25,32	24,09	26,16	24,51	26,22	26,8	28,24	27,81	28,99
Perdagangan, Hotel & Restoran	17,61	18,55	17,9	19,15	18,36	19,23	20,59	21,25	21,61	21,96
Pengangkutan & Komunikasi	0,84	0,93	0,83	0,98	0,79	0,98	0,78	1,01	0,77	1,04
Keuangan, Persewaan & Jasa Perush.	3,88	4,41	3,94	4,55	3,99	4,54	4,05	4,52	4,08	4,52
Jasa - Jasa	1,4	1,43	1,42	1,48	1,37	1,47	1,38	1,46	1,35	1,47
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Sumber : PDRB 2012, BPS Kota Kediri

Mencermati struktur ekonomi Kota Kediri atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstans, nampak bahwa peran sektor primer dan sekunder kontribusinya terhadap pembentukan PDRB semakin menurun, sedangkan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan jasa-jasa) selalu naik tiap tahunnya.

Pada sektor sekunder, sub sektor yang paling dominan adalah industri pengolahan yang kontribusinya secara fluktuatif berada diatas 70%, dari jumlah tersebut hampir 100% merupakan kontribusi dari industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau, yang didalamnya terdapat sektor industri pengolahan berkenaan dengan keberadaan industri rokok kretek PT. Gudang Garam. Selanjutnya di sektor tersier peran sub sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi hampir 20% sedangkan selebihnya didominasi oleh sub sektor jasa dan mempunyai kecenderungan peningkatan tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Kota Kediri memang dapat dicapai melalui peningkatan dan pengembangan peran, aktivitas, dan efisiensi sektor industri, perdagangan dan jasa. Sedangkan sektor-sektor lainnya memberikan kontribusi yang sangat rendah, sehingga untuk eksistensi dan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri ke depan, pertumbuhan ekonomi dari pada sektor industri, perdagangan dan jasa harus lebih dapat dipacu peningkatannya.

Tantangan lain adalah permasalahan dalam pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu masih rendahnya kapasitas UMKM Kota Kediri dalam era persaingan global. Saat ini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Kota Kediri tercatat kurang lebih ada 29.369 unit usaha baik yang sudah memiliki ijin usaha maupun belum. Daya serap tenaga kerja di sektor ini relatif besar dan merupakan basis penghasilan utama dari sebagian masyarakat kota. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, diantaranya adalah rendahnya akses permodalan, kesinambungan pasokan bahan baku, lemahnya posisi tawar sehingga menekan harga jual, kualitas produk rendah, rendahnya akses informasi pasar, dan rendahnya daya saing terhadap produk-produk pabrikan/manufaktur.

Sebagai daerah yang tidak kaya akan sumber daya alam, kegiatan usaha produksi yang berbasis sumber daya alam di Kota Kediri kurang berkembang. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tiada lain yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan peran dan potensi UMKM.

Peningkatan kemampuan dan daya saing UMKM lima tahun ke depan diarahkan untuk dapat : (a) meningkatkan produktivitas dan kualitas produk UMKM melalui peningkatan inovasi dan standarisasi produk; (b) akses ke layanan pembiayaan dan perkuatan permodalan kepada UMKM, Koperasi dan pedagang kaki lima, dengan target penyerapan tenaga kerja sebesar 30.000 tenaga kerja; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan; (d) perluasan pemasaran serta (e) Membangun kerjasama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk merekrut tenaga kerja lokal; (f) Mengembangkan usaha kecil, menengah dan industri kreatif berbasis lingkungan serta;(g) penataan sarana dan prasarana pasar tradisional dan pembangunan pasar tradisional dengan manajemen modern yang berbasis kelurahan.

Kontribusi UMKM sebagai penyedia kesempatan kerja, keberadaannya juga berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Peranan yang sangat penting tersebut tidak akan tercapai bilamana masih terdapat kendala-kendala bisnis atau usaha, baik pada masalah modal maupun akses pasar serta pengembangan ketrampilan usaha. Untuk itu pembinaan terhadap UMKM harus terus dikembangkan agar bisa tumbuh menjadi usaha yang efektif dan efisien, yang pada akhirnya memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian Kota Kediri, regional dan nasional. Sebagai kelanjutan dari program perkuatan permodalan UMKM yang dilaksanakan sebelumnya maka untuk lima tahun kedepan diperlukan adanya **penambahan penyertaan modal untuk UMKM**.

Permasalahan pembangunan terjadi karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam perencanaan yang telah disusun. Gap terjadi karena tidak atau kurang tercapainya target pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dimasa datang. Pada umumnya permasalahan pembangunan daerah timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah/eksternal yang tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, permasalahan pembangunan daerah harus diidentifikasi agar dapat dicarikan solusinya. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan agar rencana pembangunan yang akan disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah serta demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik,

seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar Negara.

Ruang lingkup *Asean Economic Community* meliputi :

1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi, yaitu adanya aliran bebas : barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terlatih;
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif meliputi : kebijakan kompetisi, proteksi konsumen, hak kekayaan intelektual (HAKI), pembangunan infrastruktur, perpajakan dan *E-Commerce*;
3. Pembangunan ekonomi yang merata : pembangunan UMKM, initiative for ASEAN Integration (IAI) “mengurangi gap pembangunan internal ASEAN”;
4. Integrasi dengan perekonomian global : pendekatan koheren dalam hubungan ekonomi eksternal “negosiasi FTA dan CEP dengan pihak non-ASEAN”, meningkatkan partisipasi dalam global supply network.

Di era perekonomian Global yang makin kompetitif, membutuhkan kerjasama antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti AEC tersebut. Sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (*preference*) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti AEC bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat Internasional hingga lokal.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan

dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang-barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non-tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, *Eco Labelling*, HACCP dan lain-lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri

Yang perlu diantisipasi dan sebagai isu strategis bagi Kota Kediri adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan dan memiliki daya saing tinggi baik daya saing lokal maupun regional dan internasional serta bagaimana produk-produk UMKM yang ada memenuhi standart ISO, eco labelling, atau standart-standart yang dipersyaratkan untuk dapat menembus pasaran ekspor.

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah yang akan dibangun sesuai dengan Misi RPJMD 2014-2019, yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing di bidang perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif, guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan Kota Kediri Tahun 2016 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2016. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Kediri Tahun 2014-2019 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing strategi yang tepat, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan, sebagai berikut :

1. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan, antara lain diarahkan untuk memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Pada satu sisi Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat. Di sisi lain diarahkan pula pada fungsi Pemerintah dalam alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi penyediaan barang publik seperti infrastruktur, penanaman modal, pelayanan kesehatan (seperti Jamkesda), pelayanan pendidikan, penyediaan kesempatan kerja dan penanganan kemiskinan;
2. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Arah ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme Aparat Sipil Negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah Kota Kediri dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
3. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan, antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan regulasi (administrasi), pengembangan skill dan manajemen sumber daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat);
4. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi

kewajibannya. Kebijakan Belanja Daerah, belanja daerah dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Selaras dan terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka dalam upaya mengantisipasi permasalahan-permasalahan di Kota Kediri dengan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Kediri, maka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul seperti permasalahan persampahan, pengembangan potensi daerah, transportasi, urbanisasi, masalah-masalah sosial (PMKS dan lain-lain), diperlukan adanya program-program pembangunan yang mengarah kepada kerjasama antar daerah.

Disisi lain karena keterbatasan pembiayaan pembangunan di Kota Kediri, maka dalam pembiayaan penyediaan fasilitas/ infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema : (1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan;(2) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, serta (3) kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

Kebijakan umum kerjasama pembiayaan pembangunan :

1. Kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah;

2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan;
3. Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat;

Berdasarkan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun 2014-2019, maka dirumuskan 9 (sembilan) Program Prioritas Utama Walikota, yang mendasari program prioritas pembangunan daerah. Sembilan program prioritas utama pembangunan tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat;
3. Penataan kota yang ramah lingkungan dan berbasis ekologi;
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan kreatif, merata dan berkeadilan;
6. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan;
7. Pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan;
8. Peningkatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur fisik prasarana, sosial dan ekonomi masyarakat;
9. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni dan budaya.

Program pembangunan daerah merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian visi **“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”** yang akan diwujudkan melalui 4 (empat) misi pembangunan,

sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.
- Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan.
- Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan.
- Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada Daerah, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan. Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2016 proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp.1.286.118.721.001,25 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.590.268.445.944,95 serta Belanja Langsung Rp.695.426.408.806,30.

Sedangkan untuk proyeksi Pembiayaan Daerah pada tahun 2016 terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp.184.429.397.687,52.

Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilaksanakan secara optimal untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan antara lain :

3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka kebijakan pendapatan daerah yang ditempuh Pemerintah Kota Kediri harus difokuskan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu :

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pemutakiran data terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang strategis;
2. Melaksanakan dan mengoptimalkan pencairan tunggakan melalui penagihan langsung ke wajib pajak/wajib retribusi;
3. Mengembangkan system pelayanan prima terhadap pungutan pajak/retribusi daerah secara real time ke wilayah strategis;
4. Membangun basis data yang didukung dengan teknologi informasi;
5. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung terhadap wajib pajak dan wajib retribusi;

6. Menyesuaikan dan menerapkan wajib pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan amanat UU No 28 Tahun 2009 dan Perda yang baru;
7. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembangan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan;
8. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah melalui bimbingan teknis dan pelatihan secara berkesinambungan.

Sumber-sumber penerimaan Pemerintah Kota Kediri dipergunakan untuk membiayai rencana pembangunan daerah. Sumber utama penerimaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2013-2016

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET	PROYEKSI
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	144.562.729.326,62	207.506.103.429,15	166.936.404.103,00	183.949.692.491,73
1	Pendapatan Asli Daerah	144.562.729.326,62	207.506.103.429,15	166.936.404.103,00	183.949.692.491,73
-	Pajak Daerah	57.840.761.515,71	68.957.535.990,43	58.000.400.000,00	68.957.535.990,43
-	Retribusi Daerah	9.631.747.601,76	8.469.711.723,00	8.181.459.127,00	8.453.188.159,00
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	587.390.769,02	785.635.046,99	1.061.637.000.000,00	1.496.662.100,00
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	76.502.829.440,13	129.293.220.668,73	99.692.907.976,00	105.042.306.242,30
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	144.562.729.326,62	207.506.103.429,15	166.936.404.103,00	183.949.692.491,73

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kediri

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri pada tahun 2014 sebesar Rp.207.506.103.429,15 jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2013 sebesar Rp.144.526.729.326,62 terdapat kenaikan sebesar 43,57%. Sedangkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.183.949.692.491,73 jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar Rp.166.936.404.103,00 terdapat kenaikan sebesar 10,19%.

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat bagian, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1.1 Pajak Daerah

Pada tahun 2014 realisasi pajak daerah sebesar Rp.68.957.535.990,43 atau naik 19,21% jika dibandingkan realisasi tahun 2013 yaitu sebesar Rp.57.840.761.515,71. Target pada tahun 2015 sebesar Rp.58.000.400.000,00 atau menurun sebesar 15,88% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Sedangkan tahun 2016 proyeksi pajak daerah sebesar Rp.68.957.535.990,43 atau naik 18,89% dari target tahun 2015. Pajak daerah yang paling besar kontribusinya pada tahun 2016 adalah Pajak Penerangan Jalan Rp.19.893.127.403,00 yaitu 28,85% dari seluruh total pendapatan pajak daerah.

Secara detail Realisasi dan Perkiraan Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2013-2016

NO	Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2013	Realisai Tahun 2014	Target Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
1.	Pajak Hotel	2.784.686.896,00	3.287.477.532,00	2.855.000.000,00	3.287.477.532,00
2.	Pajak Restoran	5.086.269.660,72	5.798.823.846,18	4.810.500.000,00	5.789.823.846,18
3.	Pajak Hiburan	738.032.654,00	1.075.059.482,00	879.900.000,00	933.900.000,00
4.	Pajak Reklame	1.674.670.730,00	2.447.859.120,00	1.655.000.000,00	2.447.859.120,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	17.026.712.714,00	19.893.127.403,00	18.350.000.000,00	19.893.127.403,00

NO	Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
6.	Pajak Parkir	428.932.620,00	432.705.480,00	500.000.000,00	432.705.480,00
7.	Pajak Air Tanah	506.977.729,00	621.981.852,00	450.000.000,00	621.981.852,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan	16.767.463.874,68	19.818.082.194,00	18.000.000.000,00	19.818.082.194,00
9.	BPHTB	12.827.014.637,31	15.582.419.081,25	10.500.000.000,00	15.582.419.081,25
J U M L A H		57.840.761.515,71	68.957.535.990,43	58,000,400,000.00	68.957.535.990,43

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kediri

1.2 Retribusi Daerah

Prosentase realisasi pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.8.469.711.723,00 mengalami penurunan 12,06% dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp.9.631.747.601,76. Sedangkan untuk proyeksi penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp.8.453.188.159,00 mengalami kenaikan sebesar 3,32% dari target retribusi daerah tahun 2015 sebesar Rp8.181.459.127,00.

Realisasi dan proyeksi pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun 2013-2016

No	Jenis Retribusi	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.034.396.500,76	830.067.500,00	605.442.500,00	605.442.500,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	590.276.000,00	637.126.000,00	586.801.800,00	937.126.000,00
3.	Ret. Penggantian biaya KTP & Akta Catatan Sipil	89.820.000,00	67.800.000,00	40.200.000,00	50.000.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat	78.842.550,00	27.939.000,00	32.400.000,00	32.724.000,00
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	3.505.237.500,00	3.595.558.000,00	3.528.722.000,00	3.595.558.000,00
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	655.135.000,00	648.809.000,00	603.965.000,00	648.809.000,00
7.	Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00
8.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	201.221.893,00	193.663.198,00	157.983.677,00	158.503.677,00
9.	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan	198.625.167,00	189.712.974,00	153.690.050,00	253.690.050,00
10.	Retribusi Terminal	307.221.850,00	307.358.150,00	283.961.900,00	307.358.150,00
11.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	82.913.000,00	89.491.500,00	90.459.000,00	90.459.000,00
12.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.430.000,00	1.610.000,00	10.708.200,00	10.815.282,00
13.	Retribusi Rumah Potong Hewan	168.960.000,00	169.560.000,00	169.475.000,00	169.600.000,00
14.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	642.131.000,00	618.197.000,00	695.400.000,00	695.400.000,00
15.	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	5.040.000,00	18.629.215,00	20.250.000,00	20.452.500,00

No	Jenis Retribusi	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
16.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	494.097.325,00	453.738.824,00	550.000.000,00	500.000.000,00
17.	Retribusi ijin tempat berjualan minuman beralkohol	50.000.000,00	25.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00
18.	Retribusi Ijin Gangguan/keramaian	521.764.816,00	592.393.262,00	567.000.000,00	624.250.000,00
19.	Retribusi Ijin Trayek	4.635.000,00	3.058.000,00	3.400.000,00	3.000.000,00
J U M L A H		9.631.747.601,76	8.469.711.623,00	8.181.459.127,00	8.453.188.159,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kediri

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk tahun 2014 sebesar Rp.785.635.046,99 atau mengalami peningkatan sebesar 34% dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar Rp.587.390769,02. Sedangkan Proyeksi tahun 2016 sebesar Rp1.496.662.100,00 jika dibandingkan target pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.1.061.637.000,00 terdapat kenaikan sebesar 40,98%.

Realisasi serta proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai tabel berikut :

Tabel 3.6

Realisasi dan Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2013 - 2016

No	Jenis Investasi/ Nama Perusahaan	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
1.	PDAM	0,00	184.358.080,46	0,00	361.186.100,00
2.	BPR Kota Kediri	0,00	0,00	461.600.000,00	468.600.000,00
3.	Bank Jatim	564.636.769,02	576.997.966,53	576.000.000,00	593.000.000,00
4.	BPR KURK Jatim	22.754.000,00	24.279.000,00	24.037.000,00	24.096.000,00
5.	Koperasi dan UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PD Pasar	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Jumlah		587.390.769,02	785.635.046,99	1.061.637.000,00	1.496.662.100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kediri

Adapun kontribusi terbesar dari jenis penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2016 adalah Bagian laba atau penyertaan modal pada Bank Jatim yaitu sebesar Rp.593.000.000,00 atau 39,62% dari total penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan denda retribusi, fasilitas umum, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito dan penerimaan lain-lain, Pendapatan BLUD, serta Hasil lelang sewa bekas tanah kas desa.

Realisasi dan proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun 2013-2106

No	Uraian	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
1.	Hasil penjualan asset daerah yang tdk dipisahkan	59.500.000,00	57.250.000,00	64.250.000,00	64,250,000.00
2.	Penerimaan Jasa Giro	3.684.560.340,55	6.099.298.541,62	3.000.000.000,00	3,000,000,000.00
3.	Pendapatan Bunga Deposito	5293.479.451,90	13.229.041.095,60	7.750.000.000,00	7,750,000,000.00
4.	Pendapatan Denda Retribusi	126.740.000,00	133.660.000,00	110.000.000,00	110,500,000.00
5.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	16,427.400,00	0,00	0,00	0.00
6.	Penerimaan Lain-lain	1.323.130.100,13	3.734.743.913,00	1.329.023.500,00	1.336.544.800.00
7.	Pendapatan BLUD	61.394.528.645,83	86.907.693.443,53	76.265.745.900,00	81.814.285.533.30
8.	Hasil lelang sewa bekas tanah kas desa	4.389.604.551,00	4.348.911.839,43	4.380.284.909,00	4,380,284,909.00
9.	Penerimaan Bunga Pinjaman dari Dana Bergulir	214.858.950,720,00	376.546.465,38	250.000.000,00	0,00
10.	Pendapatan dana kapitasi FKTP Pukesmas	0,00	0,00	6.243.603.667,00	6.290.316.000,00
11.	Pendapatan BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00	300.000.000,00	296.125.000,00
Jumlah		76.502.829.440,13	114.887.145.298,56	99.692.907.976,00	105.042.306.242,30

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kediri

Pada tahun 2014 realisasi total penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.114.887.145.298,56 atau naik sebesar 58,46% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp.72.502.829.440,13. Proyeksi tahun 2016 sebesar Rp.105.042.306.242,30 atau ada kenaikan 5,37% dari target tahun 2015 sebesar Rp.99.692.907.976,00.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan Dana yang bersumber dari APBN serta dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dan bersifat transfer. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan pemerintahan daerah, serta antar pemerintah daerah. Selain itu untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah.

Realisasi dana perimbangan tahun 2014 sebesar Rp.778.752.526.381,00 atau mengalami peningkatan sebesar 11,09% dari tahun 2013 yang terealisasi Rp.701.013.438.199,00. Untuk tahun 2016 jumlah penerimaan dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp.738.344.187.291,00 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,23% dibanding tahun 2015 sebesar Rp.770.952.509.419,00.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Dana Perimbangan
Tahun 2013-2016

No	Uraian	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2015	Proyeksi Tahun 2016
1	Dana Perimbangan				
-	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	108.070.739.199,00	118.165.747.381,00	104.517.430.419,00	103.883.018.291,00
-	Dana Alokasi Umum	562.943.089.000,00	634.351.539.000,00	634.461.169.000,00	634.461.169.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	29.999.610.000,00	26.235.240.000,00	31.973.910.000,00	0,00
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	701.013.438.199,00	778.752.526.381,00	770.952.509.419,00	738.344.187.291,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kediri

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2014, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.204.335.858.802,00 atau mengalami peningkatan sebesar 34% dari realisasi tahun 2013 yaitu Rp.134.370.546.428,00

Proyeksi sumber penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2016 sebesar Rp.179.395.443.531,00 jika dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu Rp.209.491.366.212,53. Sehingga dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat penurunan

sebesar 17%. Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada tahun 2013 - 2016

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET	PROYEKSI
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	49.201.611.428,00	83.510.636.802,00	50.024.724.212,53	63.781.004.531,00
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81.492.920.000,00	116.856.415.000,00	115.614.439.000,00	115.614.439.000,00
3.	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	3.676.015.000,00	3.968.807.000,00	43.852.203.000,00	0,00
JUMLAH		134.370.546.428,00	204.335.858.802,00	209.491.366.212,53	179.395.443.531,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kediri

3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja Daerah secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Tidak langsung dan Belanja langsung.

Alokasi belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Belanja tidak langsung digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga.

Kebijakan Belanja Daerah Kota Kediri pada tahun 2016 diarahkan untuk :

1. Meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan pembangunan infrastruktur, fisik prasarana, sosial dan ekonomi masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan dan penyediaan infrastruktur perkotaan yang memadai, meliputi infrastruktur, fisik maupun non fisik, serta teknologi informasi;
4. Memperkuat pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan memperluas kesempatan kerja;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penataan kinerja kelembagaan dan profesionalisme aparatur;
6. Meningkatkan kualitas pembangunan kota yang berkarakter dan masyarakat yang berbudaya, beriman, serta terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahun 2016 pelaksanaan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.590.268.445.944,95. Adapun perincian untuk Belanja tidak Langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai didasarkan gaji pokok dan tunjangan PNS lainnya serta diperhitungkan dengan rencana kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat maupun kenaikan besaran gaji pokok.

Realisasi belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp.471.754.298.553,29 atau meningkat sebesar 8,03% dari tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp.433.860.233.045,95. Untuk tahun 2016, proyeksi belanja pegawai sebesar Rp.532.811.331.269,95 atau menurun 8,40% dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp.581.716.043.591,72.

2. Belanja Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan

untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Realisasi belanja hibah pada tahun 2014 mengalami penurunan 3,68% atau sebesar Rp.32.291.379.113,00 dibandingkan tahun 2013 yaitu Rp.33.478.908.352,00. Untuk tahun 2015 belanja hibah sebesar Rp.24.962.821.000,00 sedangkan proyeksi pada tahun 2016 sebesar Rp.22.627.810.000,00.

3. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pada tahun 2016 proyeksi belanja bantuan sosial sebesar Rp.30.102.244.000,00. Target tahun 2015 sebesar Rp.30.252.261.448,00, sedangkan realisasi bantuan sosial pada tahun 2014 sebesar Rp.23.577.323.977,52 atau mengalami peningkatan 6,96%. Realisasi bantuan sosial pada tahun 2013 sebesar Rp.21.937.183.975,88.

4. Belanja Bantuan Keuangan

Untuk proyeksi Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2016 sebesar Rp.727.060.675,00 atau mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu sebesar Rp.583.514.792,00.

Sedangkan realisasi pada tahun 2014 sebesar Rp.557.947.900,00 atau menurun 1,21% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp.564.697.925,00.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah, serta tidak biasa/tanggap

darurat yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam program kegiatan.

Proyeksi belanja tidak terduga pada tahun 2016 sebesar Rp.4.000.000.000,00. Target tahun 2015 cenderung sama yaitu sebesar Rp.4.000.000.000,00. Realisasi tahun 2014 sebesar Rp.496.146.771,00 sedangkan tahun 2013 tidak mengalokasikan untuk belanja tidak terduga.

Realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung
Pada tahun 2013 - 2016

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
2.1.1	Belanja Pegawai	433.860.233.045,95	471.754.298.553,29	581.716.043.591,72	532.811.331.269,95
2.1.4	Belanja Hibah	33.478.908.352,00	32.291.379.113,00	24.962.821.000,00	22.627.810.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.937.183.975,88	23.577.323.977,52	30.252.261.448,00	30.102.244.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	564.6997.925,00	557.947.900,00	583.514.792,00	727.060.675,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	496.146.771,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
JUMLAH		489.841.023.298,83	528.677.096.314,81	641.514.640.831,72	590.268.445.944,95

Sumber : BPKA Kota Kediri

3.4.3 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk proyeksi pembiayaan pada tahun 2016, Pemerintah Kota Kediri tidak mengalokasikan untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Begitu pula untuk tahun 2015. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2013 dialokasikan untuk Pembayaran pokok hutang yaitu sebesar Rp.1.250.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2014 digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00.

Realisasi dan proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Kediri Tahun 2013-2016, sesuai tabel berikut :

Tabel 3.11
 Realisasi Dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 Kota Kediri Tahun 2013-2016

NO	JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1.	Penyertaan modal (investasi) daerah	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : BPKA Kota Kediri

3.5 Rekapitulasi Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Daerah

Kerangka pendanaan Pembangunan Daerah merupakan kerangka untuk mengetahui kondisi keuangan Pemerintah Daerah, baik yang terjadi sesudah tahun berkenaan (2014) maupun sebelum tahun berkenaan (tahun 2016). Kerangka pendanaan tersebut dibagi menjadi dua sisi yaitu sisi realisasi pendanaan serta sisi proyeksi pendanaan. Untuk sisi realisasi pendanaan tahun 2013 dan tahun 2014. Sedangkan sisi proyeksi pendanaan terdiri dari tahun 2015 dan tahun 2016. Kerangka pendanaan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
 Realisasi Dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
 Kota Kediri Tahun 2013-2015

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1.	PENDAPATAN DAERAH	979.946.713.953,62	1.190.594.488.612,15	1.147.380.279.734,53	
1	Pendapatan Asli Daerah	144.562.729.326,62	207.506.103.429,15	183.949.692.491,73	183.949.692.491,73
-	Pajak Daerah	57.840.761.515,71	68.957.535.990,43	68.957.535.990,43	68.957.535.990,43
-	Retribusi Daerah	9.631.747.601,76	8.469.711.723,00	8.453.188.159,00	8.453.188.159,00
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	587.390.769,02	785.635.046,99	1.496.662.100,00	1.496.662.100,00
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	76.502.829.440,13	129.293.220.668,73	105.042.306.242,30	105.042.306.242,30
2	Dana Perimbangan	701.013.438.199,00	778.752.526.381,00	738.344.187.291,00	738.344.187.291,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak	108.070.739.199,00	118.165.747.381,00	103.883.018.291,00	103.883.018.291,00
-	Dana Alokasi Umum	562.943.089.000,00	634.351.539.000,00	634.461.169.000,00	634.461.169.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	29.999.610.000,00	26.235.240.000,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	134.370.546.428,00	204.335.858.802,00	179.395.443.531,00	179.395.443.531,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	49.201.611.428,00	83.510.636.802,00	63.781.004.531,00	63.781.004.531,00
-	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81.492.920.000,00	116.856.415.000,00	115.614.439.000,00	115.614.439.000,00
-	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	3.676.015.000,00	3.968.807.000,00	0,00	0,00
2.	BELANJA DAERAH	871.479.638.834,04	979.720.261.627,89	1.432.324.496.638,72	1.286.118.721.001,25

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI		PROYEKSI	
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
2.1	Belanja Tidak Langsung	489.841.023.298,83	528.677.096.314,81	585.253.644.392,95	590.268.445.944,95
2.1.1	Belanja Pegawai	433.860.233.045,95	471.754.298.553,29	532.811.331.269,95	532.811.331.269,95
2.1.4	Belanja Hibah	33.478.908.352,00	32.291.379.113,00	15.687.810.000,00	22.627.810.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.937.183.975,88	23.577.323.977,52	32.027.442.448,00	30.102.244.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	564.697.925,00	557.947.900,00	727.060.675,00	727.060.675,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	496.146.771,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	381.638.615.535,21	451.043.165.313,08	694.193.620.556,30	695.426.408.806,30
	SURPLUS/(DEFISIT)	108.467.075.119,58	210.874.226.984,26	(177.757.941.635,52)	(184.429.397.687,52)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	118.087.856.803,20	224.554.931.922,78	177.757.941.635,52	184.429.397.687,52
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	119.337.856.803,20	226.554.931.922,78	177.757.941.635,52	184.429.397.687,52
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	119.337.856.803,20	226.554.931.922,78	177.757.941.635,52	184.429.397.687,52
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1	Penyertaan modal (investasi) daerah	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKA Kota Kediri

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARIA KARANGORA, S.H, M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001